

# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)

T  
A  
H  
U  
N  
  
2  
0  
2  
2  
  
4



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KOTA METRO**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Kota Metro, Agustus 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Tata Ruang Kota Metro



**ROBBY KURNIAWAN S.S.P.M.Si**

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19771129 200212 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. P E N D A H U L U A N</b>	
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum .....	I.6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I.11
1.4 Sistematika Penulisan .....	I.11
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstraPerangkat Daerah .....	II.1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II.8
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II.11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II.32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.33
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III.6
3.3 Program /Kegiatan/Sub Kegiatan .....	III.9
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.....	IV.1
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	V.1

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No.30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi organisasi meliputi 1 sekretariat dan 4 bidang serta 3 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yaitu:

1. Sekretariat;
2. Bidang Bina Marga;
3. Bidang Cipta Karya;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang;
6. UPTD Pengairan
7. UPTD Air Minum
8. UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memuat beberapa hal antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan Renstra.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen Renstra pada tahun berjalan.
3. Program dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja

keluaran (output), yang bersifat realistis dan terukur, dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Mengingat kedudukan strategis tersebut maka untuk menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas terdapat tahapan proses dan cakupan komprehensif yang harus terpenuhi. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah ;
- (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah ;dan
- (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah

dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pelaksanaan dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan



- e. penutup.
6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun

- 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
  27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2022-2041;
  28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
  29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9)
  30. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026;
  31. Peraturan Walikota Metro No.30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024 agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum, dan Tata Ruang Kota Metro lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

#### **2. Tujuan**

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

- a. Sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai dasar penetapan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja dan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menjelaskan tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Review terhadap RKPD Kota Metro.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, serta Program dan Kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan terhadap Isu Strategis Nasional dan terhadap Isu Strategis Propinsi.

### **BAB V PENUTUP**

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA

# PERANGKAT DAERAH TAHUN

# LALU

---

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro harus dievaluasi.

Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam konteks manajemen organisasi, Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula cara



membandingkan antara output dan input kegiatan, baik untuk rencana maupun realisasi dalam pencapaian kinerja di tahun sebelumnya. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro selama satu tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2023 sampai dengan triwulan 2 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah :

EVALUASI TERHADAP HASIL KINERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO  
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN I dan II TAHUN 2023

NAMA OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja 2023 Pada Sampai dengan Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023) sampai dengan Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%) yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II			
						I (Januari s.d Maret)		II (April s.d Juni)		III (Juli s.d September)		IV (okt s.d des)		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		
1	Terpenuhinya dukungan layanan perkantoran	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	prosentase	100	11.012.224.711	18,27	2.012.473.376	51,14	5.631.690.931	-	-	-	-	69	7.644.164.307	69,42%	69,42%
		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	447.924.700	-	15.088.900	3	137.960.490	-	-	-	-	3	153.049.390	34,17%	34,17%
		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	69.557.100	-	5.694.300	2	33.268.300	-	-	-	-	2	38.962.600	56,02%	56,02%
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	39.099.300	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	339.268.300	-	9.394.600	1	104.692.190	-	-	-	-	1	114.086.790	33,63%	33,63%
		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	Bulan	12	6.670.761.321	3	1.545.215.371	7	3.873.582.996	-	-	-	-	10	5.418.798.367	81,23%	81,23%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	74	4.659.206.721	74	1.153.216.271	74	2.993.945.661	-	-	-	-	66	4.147.161.932	89,01%	89,01%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.880.440.000	3	386.400.000	5	863.220.000	-	-	-	-	8	1.249.620.000	66,45%	66,45%
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	62.188.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	16	68.926.200	1	5.599.100	4	16.417.335	-	-	-	-	5	22.016.435	31,94%	31,94%
		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	prosentase	100	1.028.979.730	8,5465	87.941.250	69,84	718.643.750	-	-	-	-	78	806.585.000	78,39%	78,39%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	47.023.000	2	11.496.000	6	28.174.000	-	-	-	-	8	39.670.000	84,36%	84,36%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	488.481.000	0	-	13	469.421.000	-	-	-	-	13	469.421.000	96,10%	96,10%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	120	294.917.550	15	36.629.250	47	115.972.350	-	-	-	-	62	152.601.600	51,74%	51,74%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	38.810.000	15	9.639.800	28	18.034.800	-	-	-	-	43	27.674.600	71,31%	71,31%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50	48.061.180	12	11.718.500	25	23.437.000	-	-	-	-	37	35.155.500	73,15%	73,15%
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	67.077.000	2	11.469.000	5	38.391.900	-	-	-	-	7	49.860.900	74,33%	74,33%		
Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	1	44.610.000	0	6.988.700	0	25.212.700	-	-	-	-	1	32.201.400	72,18%	72,18%		

	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Unit	28	181.880.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	28	181.880.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	1.524.943.660	19,837	302.501.255	39,374	600.437.645	-	-	-	-	59	902.938.900
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	10.000.000	54	3.600.000	75	5.000.000	-	-	-	-	129	8.600.000
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.452.640.660	2	282.511.255	4	565.064.645	-	-	-	-	7	847.575.900
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	41	62.303.000	10	16.390.000	19	30.373.000	-	-	-	-	31	46.763.000
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Prosentase	100	1.157.735.300	5,3317	61.726.600	26,00	301.066.050	-	-	-	-	31	362.792.650
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.670.000	0	5.947.500	0	5.947.500	-	-	-	-	0	11.895.000
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	350.766.800	3	49.679.100	7	123.719.350	-	-	-	-	11	173.398.450
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	4	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	33.123.400	7	6.100.000	14	12.200.000	-	-	-	-	22	18.300.000
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	3	684.175.100	0	-	0	159.199.200	-	-	-	-	1	159.199.200
2	Peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Program	Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	%	92,06	34.906.011.600	0,20	75.501.500	3,09	1.173.122.034	-	-	-	3	1.248.623.534
		Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	%	92,06	34.906.011.600	0,20	75.501.500	3,09	1.173.122.034	-	-	-	3	1.248.623.534
		Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	4	114.104.900	-	2.150.300	-	11.215.300	-	-	-	0	13.365.600
		Sub Kegiatan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	15	1.556.892.300	-	2.676.600	-	12.586.600	-	-	-	0	15.263.200
		Sub Kegiatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6	489.498.500	-	1.486.000	-	11.056.000	-	-	-	0	12.542.000
		Sub Kegiatan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	5	3.913.536.300	-	13.549.600	-	218.511.600	-	-	-	0	232.061.200
		Sub Kegiatan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	6	12.170.563.900	-	10.667.700	-	86.558.700	-	-	-	0	97.226.400
		Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2,8	10.318.389.400	-	23.716.000	-	246.877.000	-	-	-	0	270.593.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	4,258	5.216.655.100	-	15.371.300	-	321.390.700	-	-	-	0	336.762.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	1	1.066.381.200	-	3.502.300	-	261.944.434	-	-	-	0	265.446.734
		Sub Kegiatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	19	59.990.000	-	2.381.700	2,00	2.981.700	-	-	-	2	5.363.400
		Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ Pemuangan aliran air tidak tersumbat	%	75	4.821.651.525	-	750.000	6	354.864.820	-	-	-	6	355.614.820
		Kegiatan	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pemuangan aliran air tidak tersumbat	M	17500	4.821.651.525	-	750.000	1291	354.864.820	-	-	-	1291	355.614.820
		Sub Kegiatan	Peningkatan Saluran drainase perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M	12500	4.373.451.525	-	600.000	939	327.914.820	-	-	-	939	328.514.820

		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	3000	448.200.000	-	150.000	181	26.950.000	-	-	-	-	-	181	27.100.000	6,05%	6,05%	
3	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	25	7.947.960.000	0,13	40.508.500	3,0619	973.444.500	-	-	-	-	-	3	1.013.953.000	12,76%	12,76%	
		Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KM	1,065	4.598.991.500	-	24.120.500	0,1624	701.427.500	-	-	-	-	-	-	0	725.548.000	15,78%	15,78%
		Sub Kegiatan	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	250.000.000	-	3.741.700	2	210.846.700	-	-	-	-	-	-	2	214.588.400	85,84%	85,84%
		Sub Kegiatan	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	M	0,39	3.109.010.900	-	7.625.800	-	436.057.800	-	-	-	-	-	-	0	443.683.600	14,27%	14,27%
		Sub Kegiatan	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi /Direstorasi	KM	2,622	250.000.000	-	3.515.600	-	20.875.600	-	-	-	-	-	-	0	24.391.200	9,76%	9,76%
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	0,102	657.298.900	-	5.494.100	-	7.394.100	-	-	-	-	-	-	0	12.888.200	1,96%	1,96%
		Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	332.681.700	-	3.743.300	5	26.253.300	-	-	-	-	-	-	5	29.996.600	9,02%	9,02%
		Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	KM	1,226	3.348.968.500	-	16.388.000	-	272.017.000	-	-	-	-	-	-	0	288.405.000	8,61%	8,61%
		Sub Kegiatan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0,604	1.585.179.200	-	9.319.400	-	156.207.400	-	-	-	-	-	-	0	165.526.800	10,44%	10,44%
		Sub Kegiatan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,515	1.369.539.300	-	3.622.800	-	110.933.800	-	-	-	-	-	-	0	114.556.600	8,36%	8,36%
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0,107	394.250.000	-	3.445.800	-	4.875.800	-	-	-	-	-	-	0	8.321.600	2,11%	2,11%
		Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	SR	2751	1.085.939.475	-	520.000	44	17.023.800	-	-	-	-	-	-	44	17.543.800	1,62%	1,62%
		Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	SR	2751	1.085.939.475	-	520.000	44	17.023.800	-	-	-	-	-	-	44	17.543.800	1,62%	1,62%
		Sub Kegiatan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	200	632.253.475	-	520.000	1	3.105.200	-	-	-	-	-	-	1	3.625.200	0,57%	0,57%
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	1	453.686.000	-	-	-	13.918.600	-	-	-	-	-	-	0	13.918.600	3,07%	3,07%
		Program	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	26	1.386.000.000	-	799.900,00	1	27.574.000	-	-	-	-	-	-	1	28.373.900	2,05%	2,05%
		Kegiatan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	Unit	7	1.386.000.000	-	799.900,00	0	27.574.000	-	-	-	-	-	-	0	28.373.900	2,05%	2,05%
		Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit	7	1.386.000.000	-	799.900,00	0	27.574.000	-	-	-	-	-	-	0	28.373.900	2,05%	2,05%
		Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Rumah Tangga	400	206.750.000	-	150.000,00	4	2.138.600	-	-	-	-	-	-	4	2.288.600	1,11%	1,11%
		Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Rumah Tangga	225	206.750.000	-	150.000,00	2	2.138.600	-	-	-	-	-	-	2	2.288.600	1,11%	1,11%
Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	138.000.000	-	150.000,00	-	1.601.400	-	-	-	-	-	-	0	1.751.400	1,27%	1,27%		
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	Rumah Tangga	175	68.750.000	-	-	1	537.200	-	-	-	-	-	-	1	537.200	0,78%	0,78%		
Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	45	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		
Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	45	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	90	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		

		Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	20	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	10	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%
4	Peningkatan pengelolaan penataan ruang	Program	Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	13	11.585.272.250	-	6.097.700	3,53	403.354.860	-	-	-	0	409.452.560	3,53%	3,53%
		Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arahana Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung	%	13	11.585.272.250	-	6.097.700	3,53	403.354.860	-	-	-	0	409.452.560	3,53%	3,53%
		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	50	385.000.000	-	2.053.400	3	19.093.400	-	-	-	3	21.146.800	5,49%	5,49%
		Sub Kegiatan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	7.007.497.000	-	794.100	-	137.806.610	-	-	-	0	138.600.710	1,98%	1,98%
		Sub Kegiatan	Penilaian terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	Unit	50	50.000.000	-	2.500.200	5	2.500.200	-	-	-	5	5.000.400	10,00%	10,00%
		Sub Kegiatan	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	12	4.142.775.250	-	750.000	1	243.954.650	-	-	-	1	244.704.650	5,91%	5,91%
		Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	91	915.000.000	2,53	25.414.400,00	6,3696	64.045.572	-	-	-	9	89.459.972	9,78%	9,78%
		Kegiatan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota	Dokumen	1	550.000.000	-	6.259.650,00	-	27.281.650	-	-	-	0	33.541.300	6,10%	6,10%
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	550.000.000	-	6.259.650,00	-	27.281.650	-	-	-	0	33.541.300	6,10%	6,10%
		Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Dokumen	6	85.000.000	-	10.610.950,00	2	19.223.122	-	-	-	2	29.834.072	35,10%	35,10%
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35.000.000	-	1.512.200,00	-	10.124.372	-	-	-	0	11.636.572	33,25%	33,25%
		Sub Kegiatan	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	5	50.000.000	-	9.098.750,00	2	9.098.750	-	-	-	2	18.197.500	36,40%	36,40%
		Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Dokumen	10	160.000.000	-	3.362.300,00	1	6.041.300	-	-	-	1	9.403.600	5,88%	5,88%
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang untuk investasi dan pembangunan daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	110.000.000	-	2.642.300,00	-	5.321.300	-	-	-	0	7.963.600	7,24%	7,24%
		Sub Kegiatan	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	5	50.000.000	-	720.000,00	-	720.000	-	-	-	0	1.440.000	2,88%	2,88%
		Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Dokumen	10	120.000.000	-	5.181.500,00	1	11.499.500	-	-	-	1	16.681.000	13,90%	13,90%
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	10	50.000.000	-	1.443.100,00	1	1.443.100	-	-	-	1	2.886.200	5,77%	5,77%
		Sub Kegiatan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5	20.000.000	-	1.800.400,00	1	1.800.400	-	-	-	1	3.600.800	18,00%	18,00%
		Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5	50.000.000	-	1.938.000,00	1	8.256.000	-	-	-	1	10.194.000	20,39%	20,39%
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																		
							74.116.809.561		2.162.215.376		8.647.259.117					10.809.474.493	22,38%	14,58%
<i>Rata-rata capaian Kinerja (%)</i>																22,38%		
<i>Predikat Kinerja</i>																		

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil kinerja periode pelaksanaan triwulan I dan triwulan II Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari 10 program 20 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan rata – rata capaian hasil kinerja sebesar 22,38%.

Sedangkan capaian RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro periode pelaksanaan triwulan I dan II Tahun 2023 atau tahun ke 3 pelaksanaan RENSTRA 2021-2026, diperoleh data capaian kinerja untuk masing-masing indikator rata- rata mencapai 90,64% dari target RENSTRA yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Periode Pelaksanaan Triwulan I dan II Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN		
				TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN I dan III TAHUN 2023	%
2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	Peningkatan pembangunan, rekontruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	92,06%	84,97%	92%
	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat		Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	75%	70%	93%
Meningkatkan Pengendalian Kuanittas dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	25%	35%	71%

	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2751	2695	98%
	Jumlah pengurangan sampah di perkotaan		Jumlah pengurangan sampah di perkotaan	26%	26%	100%
	Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi		Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi	400	375	94%
	Persentase area kawasan kumuh		Persentase area kawasan kumuh	0%	0%	100%
	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi		Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	45%	10%	22%
	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	Peningkatan Pengelolaan Penataan Ruang	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	13%	10%	77%
	Presentase ruang publik yang dirubah peruntukannya		Presentase ruang publik yang dirubah peruntukannya	0%	0%	100%
	Ketataan terhadap RTRW		Ketataan terhadap RTRW	91%	91%	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan OPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting

sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun 2021 sampai dengan triwulan II tahun 2023 pada dasarnya bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro telah melaksanakan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Adapun capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2021 s.d Tahun 2023 dan Proyeksi Capaian Kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 terdapat pada tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Metro

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target	Proyeksi Capaian s.d Triwulan II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	Peningkatan pembangunan, rekontruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	88.03%	96.06%	84,97%	93%	92.06%	92%
Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat		Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	65%	93%	75%	93%	75%	93%



Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	88%	35%	86%	25%	71%
Cakupan penduduk dengan akses air minum layak		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2591	115%	2695	102%	2751	98%
Jumlah pengurangan sampah di perkotaan		Jumlah pengurangan sampah di perkotaan	17%	100%	26%	100%	26%	100%
Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi		Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi	150	50%	375	107%	400	94%
Persentase area kawasan kumuh		Persentase area kawasan kumuh	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Presentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi		Presentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	0%	0%	10%	33%	45%	100%
Presentase ruang publik yang dirubah peruntukkannya		Presentase ruang publik yang dirubah peruntukkannya	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Ketataan terhadap RTRW		Ketataan terhadap RTRW	91%	100%	91%	100%	91%	100%
Terpenuhinya dukungan layanan perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	90%	100%	95%	100%	69%

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Pemerintahan Kota Metro masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Adapun kendala dan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Tantangan dan Isu Strategis Infrastruktur Jalan**

#### **Tantangan**

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi daerah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi daerah melalui sistem jaringan jalan daerah, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam daerah maupun antar daerah.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga

memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.

- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan luas/panjang jalan yang telah sangat timpang, yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan kota, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

### **Isu Strategis**

- Infrastruktur pengendalian banjir untuk mengatasi titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota.
- Pengendalian kemacetan lalu lintas dengan pembangunan *ringroad* di lingkaran kota sebagai jalan alternatif.
- Kebutuhan peningkatan akses wisata seperti: jalan akses menuju wisata capit urang.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kota yang meliputi pemantapan jaringan jalan.

## **2. Tantangan dan Isu Strategis Infrastruktur Sumber Daya Air**

### **Tantangan**

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan turunnya permukaan air tanah dan *land subsidence*.
- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan keberlangsungan pengambilan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelangkaan air.
- Menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai.
- Melindungi dan memperbaiki ekosistem yang terkait air.
- Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

### **Isu Strategis**

- Pengutan penyediaan air minum berkelanjutan (perpipaan).

- Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal

RKPD Kota Metro dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan 12 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro disajikan dalam Tabel 2.3 di bawah ini:

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Baru/Keptendagri 050--5889 Tahun 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		TAGGING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	4	5	6	6	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tersedianya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Metro	12 Program	89.304.964.561	DAU/PAD/DBH	12 Program	96.992.527.594	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	Kota Metro	5 Kegiatan	11.300.424.711	PAD	5 Kegiatan	12.320.467.182	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	9 dokumen	636.124.700	PAD	9 dokumen	699.737.170	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	4 Dokumen	82.757.100	PAD	4 Dokumen	91.032.810	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	39.099.300	PAD	2 Dokumen	43.009.230	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1 03 01 2.01 06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	3 laporan	514.268.300	PAD	3 laporan	565.695.130	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	Kota Metro	12 bulan	6.670.761.321	PAD/DAU	12 bulan	7.337.837.453	

01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	75	4.659.206.721	DAU	75	5.125.127.393	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	12 dokumen	1.880.440.000,00	DAU	12 dokumen	2.068.484.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	12 laporan	62.188.400	PAD	12 laporan	68.407.240	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteranJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Metro	16 laporan	68.926.200	PAD	16 laporan	75.818.820	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</b>	Kota Metro	<b>12 Bulan</b>	<b>100.000.000</b>			<b>110.000.000</b>	
01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Metro	1 Dokumen	50.000.000	PAD	1 Dokumen	55.000.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI



1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Metro	75 Dokumen	50.000.000	PAD	75 Dokumen	55.000.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kota Metro	100%	1.028.979.730	PAD	100%	1.131.877.703	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	10 paket	47.023.000	PAD	10 paket	51.725.300	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	14 paket	488.481.000	PAD	11 paket	537.329.100	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Metro	120 paket	294.917.550	PAD	120 paket	324.409.305	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Metro	60 paket	38.810.000,00	PAD	60 paket	42.691.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI

1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Metro	50 dokumen	48.061.180	PAD	50 dokumen	52.867.298	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	10 kali	67.077.000	PAD	10 kali	73.784.700	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Kota Metro	1 dokumen	44.610.000	PAD	1 dokumen	49.071.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kota Metro	28 Unit	181.880.000	PAD	28 Unit	200.068.000	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kota Metro	28 Unit	181.880.000	PAD	28 Unit	200.068.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro	100%	1.524.943.660	PAD	100%	1.677.438.026	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	150 laporan	10.000.000	PAD	150 laporan	11.000.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI

1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Metro	12 laporan	1.452.640.660	PAD	12 laporan	1.597.904.726	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	41 laporan	62.303.000	PAD	41 laporan	68.533.300	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik</b>	Kota Metro	<b>100%</b>	<b>1.157.735.300</b>	<b>PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.273.508.830</b>	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	1 Unit	39.670.000	PAD	1Unit	43.637.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	22 Unit	350.766.800	PAD	22 Unit	385.843.480	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Metro	4 unit	50.000.000	PAD	4 unit	55.000.000	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI

1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro	40 unit	33.123.400	PAD	40 unit	36.435.740	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro	3 Unit	684.175.100	PAD	3 Unit	752.592.610	PRIORITAS KOTA NO.3 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)/PRIORITAS PROVINSI NO.4 REFORMASI BIROKRASI
1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Kota Metro	20%	9.797.960.000	PAD/DBH	15%	10.777.756.000	
1	03	02	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terseleenggaranya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Metro	13,01 Km	5.898.991.500	PAD/DBH	13,01 Km	6.488.890.650	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kota Metro	10 Unit	250.000.000	DBH	10 Unit	275.000.000	
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Kota Metro	6,41 Km	3.259.010.900	DBH	6,41 Km	3.584.911.990	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kota Metro	6 Unit	250.000.000	DBH	6 Unit	275.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi/Direstorasi	Kota Metro	3,6 Km	1.150.000.000	DBH	3,6 Km	1.265.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Metro	3 Km	657.298.900	DBH	3 Km	723.028.790	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota/daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro	50 Orang	332.681.700	PAD	50 Orang	365.949.870	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Kota Metro	183,53 Km	3.898.968.500	DBH	183,53 Km	4.288.865.350	

1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kota Metro	25,03 Km	1.635.179.200	DBH	25,03 Km	1.798.697.120	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Metro	153,5 Km	1.869.539.300	DBH	153,5 Km	2.056.493.230	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	5 Km	394.250.000	DBH	5 Km	433.675.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	3	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun	Kota Metro	2851 SR	1.279.939.475	DBH	2951 SR	550.000.000	
1	3	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun	Kota Metro	2851 SR	1.279.939.475	DBH	2951 SR	550.000.000	

1	3	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kota Metro	196 SR	632.253.475	DBH	196 SR	695.478.823	SPM AIR MINUM/PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	3	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Kota Metro	1 Unit	647.686.000	DBH	1 Unit	712.454.600	SPM AIR MINUM/PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Kota Metro	28%	1.386.000.000	DBH/PAD	30%	1.524.600.000	
1	3	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Kota Metro	28%	1.386.000.000	DBH/PAD	30%	1.524.600.000	

1	3	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Kota Metro	7 unit	1.386.000.000	DBH	7 unit	1.524.600.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Kota Metro	450 Rumah Tangga	388.000.000	DBH	500 Rumah Tangga	151.800.000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Kota Metro	450 Rumah Tangga	388.000.000	DBH	500 Rumah Tangga	151.800.000	
1	03	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	1 Unit	138.000.000	DBH	1 Unit	151.800.000	SPM AIR LIMBAH/PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kota Metro	20 Unit	250.000.000	DBH	20 Unit	275.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kota Metro	78%	4.671.651.525	DBH	80%	5.138.816.677	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kota Metro	17500 Meter	4.671.651.524,50	DBH	19250 Meter	5.138.816.677	



1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran drainase perkotaan dan lingkungan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Metro	15800 Meter	4.223.451.524,50	DBH	16000 Meter	4.645.796.677	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	1000 Meter	448.200.000	DBH	3000 Meter	493.020.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Kota Metro	14%	10.750.674.250	PAD, DBH	15%	11.825.741.675	
1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Kota Metro	14%	10.750.674.250	PAD, DBH	15%	11.825.741.675	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Metro	55 Dokumen	435.000.000	PAD	55 Dokumen	478.500.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	10 Dokumen	7.007.497.000	DBH	5 Dokumen	7.708.246.700	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Dinas PUTR	16 Unit	2.508.177.250	DBH	16 Unit	2.758.994.975	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Dinas PUTR	12 unit	800.000.000	DBH	12 unit	880.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Ruang publik yang berubah peruntukannya</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>0%</b>	<b>459.348.000</b>	<b>DBH</b>	<b>0%</b>	<b>505.282.800</b>	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah	Kota Metro	2 kawasan	459.348.000	DBH	2 Kawasan	505.282.800	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Metro	1 Kawasan	459.348.000	DBH	1 Kawasan	505.282.800	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

1	03	10		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	<b>Kota Metro</b>	92,27	<b>47.513.866.600</b>	PAD, DBH	92,48	<b>52.265.253.260</b>		
1	03	10	2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	<b>Kota Metro</b>	92,27	<b>47.513.866.600</b>	PAD, DBH	92,48	<b>52.265.253.260</b>		
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Diseluruh Wilayah Kota Metro	1 Dokumen	135.772.300	PAD	1 Dokumen	149.349.530	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Diseluruh Wilayah Kota Metro	6 Dokumen	486.228.500	PAD	6 Dokumen	534.851.350	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Diseluruh Wilayah Kota Metro	2,15 Km	7.212.136.300	DBH	3 Km	7.933.349.930	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Diseluruh Wilayah Kota Metro	35,39 Km	24.796.096.800	DBH	40 Km	27.275.706.480	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

1 03	10 2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Diseluruh Wilayah Kota Metro	10,91 Km	8.403.149.400	DBH	12 Km	9.243.464.340	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1 03	10 2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Diseluruh Wilayah Kota Metro	3,44 Km	5.371.589.500	DBH	4,258 KM	5.908.748.450	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1 03	10 2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Diseluruh Wilayah Kota Metro	1 KM	1.048.903.800	DBH	1 KM	1.153.794.180	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1 03	10 2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Dinas PUTR Kota Metro	19 M	59.990.000	DBH	20 M	65.989.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1 03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi	Kota Metro	60%	250.000.000	PAD	75%	275.000.000	
1 03	11 2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi	Kota Metro	60%	150.000.000	PAD	75%	385.000.000	

1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kota Metro	90 orang	150.000.000	PAD	100 orang	165.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi	Kota Metro	25 dokumen	100.000.000	PAD	25 dokumen	110.000.000	
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kota Metro	20 Dokumen	50.000.000	PAD	20 dokumen	55.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Kota Metro	5 Dokumen	50.000.000	PAD	10 dokumen	55.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Ketaatan terhadap RTRW	Kota Metro	91%	1.507.100.000	PAD	91%	1.657.810.000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kota Metro	5 dokumen	170.000.000	PAD	6 dokumen	187.000.000	

1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Perundangan-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Metro	5 dokumen	170.000.000	PAD	6 dokumen	187.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Kota Metro	6 dokumen	200.000.000,00	PAD	7 dokumen	220.000.000	
1	03	12	2.02	03	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Metro	5 Dokumen	200.000.000,00	PAD	6 Dokumen	220.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	12	2.03		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Kota Metro	10 Dokumen	350.000.000,00	PAD	11 Dokumen	385.000.000,00	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang untuk investasi dan pembangunan daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Metro	5 Dokumen	200.000.000,00	PAD	6 Dokumen	220.000.000,00	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Metro	5 Dokumen	150.000.000,00	PAD	5 Dokumen	165.000.000,00	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Kota Metro	7 Dokumen	787.100.000	PAD	8 Dokumen	865.810.000	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Metro	5 Dokumen	200.000.000,00	PAD	5 Dokumen	220.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kota Metro	1 Kasus	20.000.000,00	PAD	2 Kasus	22.000.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Metro	2 Dokumen	567.100.000,00	PAD	3 Dokumen	623.810.000	PRIORITAS KOTA NO. 2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN /PRIORITAS PROV NO 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/PRIORITAS NASIONAL NO 7 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
<b>JUMLAH</b>									<b>89.304.964.560,50</b>			<b>96.992.527.594</b>	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Metro baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvei serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Metro. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan.

Sekitar 70% hasil usulan masyarakat melalui forum MUSRENBANG akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro yang usulan prioritasnya mempertimbangkan prioritas usulan dari kewilayahan serta kemudian dilakukan pengurutan melalui perhitungan bobot dan nilai sebagai penentu urutan prioritas dalam penanganan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program *topdown* yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kelurahan , kecamatan



dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun

## Usulan Kegiatan MUSRENBANG Kelurahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024

### 1.KECAMATAN METRO PUSAT

#### USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK TAHUN 2024 MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2023

Kelurahan : Hadimulyo Barat  
Kecamatan : Metro Pusat

NO.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	Drainase	Jl. Natuna + Jl. Padat karya I Rt 03 Rw 01 A	135 M	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
2	Hotmik	Jl.Padat Karya RT 01 RW 01B	101 M	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
3	Drainase	Jl.Padat Karya RT 01 RW 01B	101 M	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
4	Hotmik	Jl.Merak RT 09 RW 02	100 M	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
5	Hotmik	Jl.Poksai 3 RT 17 RW 04/Samping Masjid Al Kirom	150 M	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
6	Hotmik	Jl.Bangau RT 39 & RT 42 RW 10	100 M	Dinas PU dan Tata Ruang

#### USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK TAHUN 2024 MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2023

Kelurahan : Yosomulyo  
Kecamatan : Metro Pusat

NO	USULAN	LOKASI	VOLUME	OPD
1	JEMBATAN /GORONG-GORONG	JL. KEDONDONG RT 31 RW 10	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	PEMBANGUNAN JALAN ONDERLAGH/COR BLOK	JL. PERTANIAN RT 44 RW 14	1 Paket	Dinas PU dan Tata Ruang
3	PENINGKATAN JALAN HOTMIX	JL. LECI RT 32 RW 11	1 Paket	Dinas PU dan Tata Ruang
4	CORBLOK	Jl. PEPAWA RT 08 RW 03 (Jalan Tembus Ke Jl. Tawes)	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	DRAINASE	Jl. LOBA LOBI RT 28, 29 RW 10	1 Paket	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	PENINGKATAN JALAN HOTMIX	Jl Cempaka 1 s.d 12 RT 33B RW 11	1 Paket	Dinas PU dan Tata Ruang
	<b>JUMLAH</b>			

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK TAHUN 2024  
MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2023**

Kelurahan : Hadimulyo Timur  
Kecamatan : Metro Pusat

NO	USULAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	COR BETON	JL Bulak sari Rt 24A Rw 09	5M X 1000M	Dinas PU dan Tata Ruang
2	DRAINASE(KANAN & KIRI)	JL Bulak sari Rt 24b Rw 09	1000M	Dinas PU dan Tata Ruang
3	DRAINASE	JL.Wr Supratman	1500M	Dinas PU dan Tata Ruang
4	HOTMIK JALAN	JL. Kangguru Rt 29 Rw 11	1000 M	Dinas PU dan Tata Ruang
5	DRAINASE + PERBAIKAN JALAN	JL. Macan Bawah Rt 14 Rw 05	300M X 3M	Dinas PU dan Tata Ruang
6	ONDERLAG	Jl tanggul Komplek SMA 5 Rt 40	3M X 300M	Dinas PU dan Tata Ruang

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG FISIK TAHUN 2024  
MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2023**

Kelurahan : Imopuro  
Kecamatan : Metro Pusat

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	Cor Blok	RT.003 RW.001	200m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Perbaikan jalan	Jl.Maulana RT.15	250m	Dinas PU dan Tata Ruang
3	Perbaikan jalan	Jl. Gotong Royong RT.015	± 200 m	Dinas PU dan Tata Ruang
4	Rehab Gorong-gorong	Jl. Teuku Umar dan Jl. Irigasi RT. 003 RW. 001	3 X 2 m	Dinas PU dan Tata Ruang
5	Cor Blok	Jl. Bandar Marga Gg. Pos RT. 021	45 m	Dinas PU dan Tata Ruang
6	Pembuatan Jalan Hotmix	Jl. Kapten Harun Gg. Mataram (RT. 027)	86 m	Dinas PU dan Tata Ruang
7	Rehab Trotoar	Jl. Sutrisno Rt. 031	50 m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK TAHUN 2024  
MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2023**

Kelurahan : Metro  
Kecamatan : Metro Pusat

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	onderlagh	Jl. Karet Rt.51	300m	Dinas PU dan Tata Ruang
2	Perbaikan tutup drainase besar	gg. Rapol rt.11 rw.02	300m	Dinas PU dan Tata Ruang
3	rehab anak sungai ( Saluran Drainase Primer )	rt.32,33 rw.06 jl. Melati timur	lebar atas 1,20m /lebar bawah 1m/panjang tinggi 1,10m/panjang 150m/tipe 1,5	Dinas PU dan Tata Ruang
4	perbaikan jalan	rt.54 jl rafflesia 2 rw.09 prasanti	150m	Dinas PU dan Tata Ruang
5	Perbaikan drainase	rt.23/rw.05	(+) 100m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	rehab anak sungai ( Saluran Drainase Primer )	rt.32,33 rw.06 jl. Melati timur	lebar atas 1,20m /lebar bawah 1m/panjang tinggi 1,10m/panjang 150m/tipe 1,5	Dinas PU dan Tata Ruang
7	pembuatan drainase dan corblok	gg. Jiweng rt.43 rw.07	p.65m l.40X40m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	perbaikan drainase	jl. Za Pager Alam RT.13 RW.03	P 50 x L 2m	Dinas PU dan Tata Ruang
9	perbaikan drainase	rt.55 rw.09	600m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Rehab Drainase	gg. Antorium 10 RT.45 RW.08	LA. 0,5m LB 0,40 T.050m P.200m	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## 2. KECAMATAN METRO BARAT

NO	KELURAHAN	USULAN PRIORITAS	KET
1	<b>GANJAR ASRI</b>	1. Pemb. Bronjong dan Pengerukan Lumpur di aliran Air (Talud) menuju kali Batang Hari	RW. 01
		2. Pelebaran Jembatan dan Pemb/Perbaikan Draenase	Jl. Khaiberas (Depan Masjid Jami'ul Anwar)RW.02 Kel. Ganjar Asri
		3. Pemb. Pagar Kantor Kelurahan dan Pemb/Perbaikan Drainase Kel. Ganjar Asri	Jl. Khaiberas Rt.001 Rw. 01
		4. Normalisasi / pengerukan lumpur di aliran air / Talud menuju Kali Bunut.	RW. 08, RW. 09, RW.01
		5. Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jl. TPU (Arah Makam Pahlawan)
2	<b>GANJAR AGUNG</b>	1. Peningkatan Jalan Sasana Bhakti	Komplek Lapangan Sasana Bhakti
		2. Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jl. Truno Joyo Rt. 37 Rw. 13
		3. Pemeliharaan Jl. Hotmix	Jl. Nyerupa Rt. 32 Rw. 11
		4. Pemeliharaan Jl. Hotmix	Jl. Pajajaran Rt. 17 Rw. 06
		5. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan	Kel. Ganjar Agung
3	<b>MULYOJATI</b>	1. Pembangunan Talud,Pengerasan dan Perbaikan Jalan Al Muttaqin 2	Rt. 05 Rw. 02
		2. Perbaikan Jalan Gotong Royong	Rw. 01 Tembus Rw. 02
		3. Pemb. Jalan dan Drainase Jl. Tamsir	Rt. 18 Rw. 04
		4. Pemb. Drainase Jl. Mitra Mandiri	Rw. 01 Rw. 02
		5. Pemb. Jl. Onderlagh Jl. Sakinah 3Rt.	Rt. 12 Rw. 02
4	<b>MULYOSARI</b>	1. Pelebaran dan Pemeliharaan jalan Piagam Jakarta	RW. 001 dan RW 002
		2. Pelebaran Jembatan Jl. Proklamasi	Rw. 002 dan Rw. 003
		3. Pembangunan/Peninggian	Rt. 011 Rw. 003

		Jembatan Jl. Nusantara	
		4. Pembangunan Pondasi /Talud Kanan Kiri Jl empang	Rt. 05 Rw. 02
		5. Peningkatan Jl. Lataston	Rt. 006 Rw. 002

### 3. KECAMATAN METRO TIMUR

NO	KELURAHAN	USULAN PRIORITAS	
1	IRINGMULYO	1	Pengaspalan Gg. Masjid Al - Ikhlas 3, Rt. 08, Rw. 04
		2	Pembangunan Drainase + TutupTahu Jl. Satelit II, Rw. 04
		3	Pengaspalan Gg. Masjid, Rt. 40, Rw. 18
		4	Gorong - Gorong Jl. Satelit II, Rt. 32, Rw. 15
		5	Pengaspalan Jl. Pala IV, Rt. 12, Rw. 06
		6	JalanOnderlagh Jl. Abri, Gg. Buntu, Rt. 27, Rw. 12
		7	PerbaikanCor Block / Aspal Gg. Jupiter 5, Rt. 38, Rw. 17
		8	RehapTrotoar Jl. A. Yani, Depan Kantor KelurahanIringmulyo
		9	Drainase Jl. Belimbing, Rt. 03, Rw. 02
		10	PerbaikanDrainase Jl. Selagai, Rt. 30, Rw. 14
2	YOSODADI	1	Hotmix&Pengerasanbahujalan Jl.Tawes Rw.03 Rw.05
		2	Hotmix&Pengerasanbahujalan Jl.Lumba-lumbasampaiJl.Cumi-cumi Rw.3/5/6/7/8/9/12
		3	Kantor Sekretariat LPM Jl.AhNasution
		4	PengerasanBahujalan Jl.Mujaer Rw.03 Rw.05
		5	PengerasanBahujalan Jl. GatotSubroto
3	YOSOREJO	1	PerluasanGedung PKK KelurahanYosorejo
		2	GapuraMakam Jl. Mahakam
		3	Perbaikandrainase Jl. Batanghari RW 04
		4	PerbaikanDrainase Jl. Way Lalaan RT. 18, RT.19 dan RT 20/RW. 05
		5	Drainase Jl. Ikan Koi RT.26/RW.07
		6	PerbaikanGorong-gorong Jl. TulangBawang, RT.09/RW.03
4	TEJOAGUNG	1	Jembatan/Gorong-gorong Jl. Sawah, RW 01, TejoAgung
		2	Onderlagh/hotmix Jl. Villa Gading Mas, RT 31 RW 07, TejoAgung
		3	Tianglistrikdanlampupeneranganjalan PerumnasdepanPosyandu, RT 21 RW 05, TejoAgung
			Jl. Kapling 2, RT 41 RW 09, TejoAgung
			Jl. Cemara, RT 41 RW 09, TejoAgung

			Jl. Villa Gading Mas, RT 31 RW 07, TejoAgung
		Lampupeneranganjalan	Jl. Tomat, RT 07 RW 02, TejoAgung
			RT 09 RW 02, TejoAgung
5	TEJOSARI	1.	Pembangunan JalanArahPondokPesantrenNurul Anwar
		2.	PelebaranJl.Madukoro
			Jl. Apel RT.21 RW.08 danJl.Salam RT.20 RW.07
			RW.01 s/d RW.05

#### 4. KECAMATAN METRO SELATAN

##### BERITA ACARA MUSRENBANG KECAMATAN METRO SELATAN TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Enam Belas, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan Metro Selatan yang dihadiri oleh Perwakilan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosbud Kelurahan Margodadi, Sumbersari Bantul, Margorejo, dan Rejomulyo, serta unsur OPD terkait, kasi Kesra dan Kasi Ekobang Kecamatan Metro Selatan masing-masing kelurahan.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat : H. SUPARJO RUSTAM,

Sekretaris : MARGENTA ZULFIKA S, S.IP, Kasi Pembangunan Kec. Metro Selatan

Narasumber : 1. BAPPEDA Kota Metro

2. Perwakilan OPD Kota Metro

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik per masing-masing Bidang, maka para peserta rapat menyetujui dan memutuskan :

Menetapkan rencana usulan per masing-masing bidang tahun 2023 sesuai skala prioritas dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

##### MENYEPAKATI

NO	KELURAHAN	USULAN PRIORITAS	KET
1	MARGODADI	1. Sarana dan Prasarana Peralatan Qosidah Modern TPQ Al-Fadilah, Jl. Nusantara RT. 006 RW. 002	Sosbud
		2. Pengadaan Alat Musik Akustik Karang Taruna	Sosbud
		3. Pengadaan Bentor Bank Sampah Jl. Kamboja 5 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Margodadi	Fisik
		4. Bantuan Kelompok Tani Hidroponik dan Tabulapot RW. 006/RT. 023/Petani Milenial	Fisik
		5. Pengadaan Sumur Bor TPU Jl. Nusantara RT. 006 RW. 002	Fisik
		6. Pengerasan Jalan Usaha Tani RW 002/Kelompok Usaha Muda	Fisik
		7. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Jl. Jati RT 024 RW 006	Ekonomi
		8. Pengadaan Indukan Ikan Gurame Kelompok Perikanan Mina Tirta Lestari. Jl. Nusantara Tengah RT 010 RW 003	Ekonomi
		9. Bantuan bibit/anak domba KWT Srikandi	Ekonomi

2	SUMBERSARI	1. Pembangunan Pagar Makam RW. 003	Sosbud
		2. Pemasangan Tiang Dan Lampu Makam RW. 001	Sosbud
		3. Pembangunan Jl. Hotmix Jl. Husodo/FKPPI RW. 001 s/d RW. 002	Fisik
		4. Pembangunan Jl. Hotmix Jl. Lingkar Lapangan RT. 006 RW. 002	Fisik
		5. Pengadaan Sumur Bor TPU RW. 003	Fisik
		6. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Klp. Tani Maju Jl. Maju RT. 03 RW. 01	Ekonomi
		7. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Klp. Tani Sri Makmur Jl. Dewi Sri RT. 09, RW. 02	Ekonomi
		8. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Klp. Tani Makmur I Jl. Makmur RT. 002, RW. 001	Ekonomi
		9. Perbaikan Irigasi Tirtosari KBH 6 KA1 RT. 001 RW. 003	Ekonomi
3	MARGOREJO	1. Rehabilitasi Posyandu Nusa Indah RT. 025, RW. 006	Sosbud
		2. Normalisasi Anak Sungai RT. 001	Fisik
		3. Pengaspalan Jalan (Latanan) RW. 001 Jl. Merbabu	Fisik
		4. Pengadaan Sumur Bor TPU RW. 006	Fisik
		5. Bantuan Kelompok Tani Hidroponik dan Tabulapot Petani Milineal RW. 006. RT. 023	Ekonomi
		6. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kelompok Usaha Muda RW. 002	Ekonomi
4	REJOMULYO	1. Bantuan Rumah Ibadah Mushola Al-Hidayah RW. 003 RT. 010	Sosbud
		2. Sarpras Rukun Kematian RW. 001. RW. 002. RW. 003	Sosbud
		3. Bantuan Sarana Prasarana RW 001 RT. 002	Sosbud
		4. Rehab Aula Kelurahan Rejomulyo	Fisik
		5. Pemeliharaan Jalan FKPPI	Fisik
		6. Kolam Bundar KLP Mina Makmur	Ekonomi
		7. Blower KLP Mina Makmur	Ekonomi
		8. Pompa Celup KLP Mina Makmur	Ekonomi
		9. Mesin Ikan Pelet KLP Wijaya Rejomakmur RT 029 RW 007	Ekonomi

## 5.KECAMATAN METRO UTARA

### BERITA ACARA MUSRENBANG KECAMATAN METRO UTARA TAHUN 2023 BIDANG FISIK

hari ini, Rabu, Tanggal Lima Belas, Bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Metro Utara Bidang Fisik yang dihadiri oleh perwakilan Bidang Fisik kelurahan Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, dan Karangrejo, serta unsur OPD terkait, kasi Pembangunan Kecamatan Metro Utara dan para kasi Ekonomi Pembangunan masing-masing kelurahan.

Untuk Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat : SUPRIYANTO, Perwakilan Bidang Fisik Kel. Banjarsari  
 Sekretaris : Y. EDHI WIBOWO., Kasi Pemoangan Kec. Metro Utara  
 Narasumber : 1. WILASTRI, S.IP, Camat Metro Utara  
 2. YENNY RAHMAH, unsur Bappeda Kota Metro

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik Bidang Fisik, maka para peserta rapat menyetujui dan memutuskan :

Menetapkan rencana usulan pembangunan bidang Fisik tahun 2023 sesuai skala prioritas dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

KELURAHAN	USULAN PRIORITAS	KET
BANJARSARI	1. Rehab Berat Kantor Kelurahan Banjarsari	
	2. Drainase Jl. Kartini, RT62 RW 03	
	3. Onderlagh, Jl. Nuri, Gg. Ludoyo, RT57RW10	
	4. Drainase, Jl. Nuri, RT 56,57,58,59, RW 12	
	5. Pemeliharaan Jl. Lembu, RT38,39 RW 08	
PURWOSARI	1. Rehab Aula Purwosari	
	2. Talud Pengaman, Jl. Kucing, RT40RW07	
	3. Perbaikan Jl. Bison 6, RT09 RW 02	
	4. Lanjutan Pembuatan Pagar Makam, RW07	
	5. Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Bison RT09, RW02	
PURWOASRI	1. Hotmix Lanjutan, Jl. Capit Urang, RT25 RW 07	
	2. Hotmix Jl. Lego, RT25, RW 07	
	3. Drainase Jl. Walat RT25 RW 07	
	4. Drainase Jl. Sriti Induk, RT25 RW07	
	5. Hotmix Jl. Naga, RT09 RW03	
KARANGREJO	1. Hotmix Lanjutan Arah Makam, Jl. Lestari 5 RW09	
	2. Onderlagh Gg. Melati 3 RW5	
	3. Drainase, Jl. Mangga 6 RW03	
	4. Jalan Usaha Tani RW 02	
	5. Hotmix, Jl. Cengkeh 1, RW 08	

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN

### PERANGKAT DAERAH

---

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional Sesuai dengan Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. RKP 2024 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024 yang meliputi :

- PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadiliran Pariwisata
- PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan UMKM
- PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
- PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung



pengembangan ekonomi dasar.

- PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment)

Arah kebijakan dan sasaran serta prioritas terkait dengan fokus pembangunan infrastruktur yaitu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Arah ini kemudian diterjemahkan kedalam agenda pembangunan yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi serta tetap mempertahankan program pola padat karya.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pembangunan akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah. Ageda pembangunan ini diturunkan kedalam prioritas dan kegiatan prioritas

- A. Infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  4. Keselamatan dan keamanan transportasi;

5. Keselamatan kebencanaan infrastruktur;
  6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- B. Infrastruktur ekonomi , dengan kegiatan prioritas,yaitu:
1. Konektivitas jalan;
  2. Konektivitas kereta api;
  3. Konektivitas laut;
  4. Konektivitas udara;
  5. Konektivitas darat.
- C. Infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu
1. Transportasi Perkotaan dan;
  2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan.
- D. Energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu;
1. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
  2. Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan;  
dan ;
  3. Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik
- E. Transformasi digital , dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Penuntasan infrastruktur TIK;
  2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK;
  3. Fasilitas pendukung transformasi digital

Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Tema Pembangunan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 yaitu Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2024

“Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif”. Enam (6) prioritas arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembangunan infrastruktur;
4. Reformasi birokrasi;
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah Rakyat Lampung Berjaya. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah

terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhansandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1 :

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

2. Misi-2 :

Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

3. Misi-3 :

Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

4. Misi-4 :

*RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 I-14*

Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

5. Misi-5 :

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Misi-6 :

Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Arah dan Kebijakan RPJMD Kota Metro Tahun 2024 yaitu “Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas” dengan tema RKPD pada Tahun 2024 “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Kuliatas Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan RPJMD Naisonal,RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMD Kota Metro Tahun 2024 serta dalam rangka menghadapi

permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas PUTR Kota Metro sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan Dinas PUTR Kota Metro adalah misi ketiga yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”.

Dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran yang menjadi urusan Dinas PUTR Kota Metro, yaitu mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan dengan indikator tujuan/sasaran persentase jalan kota dalam kondisi mantap. Penetapan tujuan/sasaran persentase jalan kota dalam kondisi mantap dengan satu sasaran yang menjadi urusan Dinas PUTR Kota Metro, yaitu meningkatkannya kualitas konektivitas kota.

Berdasarkan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	91,64 %	91,85 %	92,06 %	92,27 %	92,48 %	92,48 %
			Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran	70%	75%	75%	78%	80%	80%

			air tidak tersumbat						
	Meningkatkan Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	35%	30%	25%	20%	15%	15%
			Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2251	2651	2751	2851	2951	2951
			jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	17%	26%	26%	28%	30%	30%
			Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi	300	350	400	450	500	500
			Persentasi area Kawasan Kumuh	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	15%	30%	45%	60%	75%	75%
		Peningkatan pengelolaan penataan ruang	rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	11%	12%	13%	14%	15%	16%
			Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Ketaatan terhadap	91%	91%	91%	91%	91%	91%

			RTRW						
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

### 3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rancangan awal rencana kerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024 mempertimbangkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan program prioritas kepala daerah yang tercantum di dalam RPJMD 2021-2026.

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
    2. Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
    3. Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
    4. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
    5. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
    6. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah
  2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
    1. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
    2. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
    3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/Kota
    1. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Dikawasan Perkotaan
    2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
  1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
    2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

## 7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
  2. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  4. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

## 8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
  1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

## 9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  1. Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan
  2. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan

3. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
4. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
5. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
8. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

#### 10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  1. Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

#### 11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
  1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
2. Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tataruang Daerah Kab/Kota
  1. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
2. Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kab/Kota
  1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

2. Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota
  1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
  2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN

## PENDANAAN PERANGKAT

## DAERAH

Untuk rancangan awal rencana kerja tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merencanakan 12 program, 22 kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran keseluruhan Rp.89.304.964.560,50 Adapun rincian adalah sebgaimana berikut:

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	4	5	6	6	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tersedianya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Metro	12 Program	<b>89.304.964.560,50</b>	
1 03 01 2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	<b>Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>11.300.42 4.711</b>	<b>PAD</b>
1 03 01 2.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>9 dokumen</b>	<b>636.124.700</b>	<b>PAD</b>

1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	4 Dokumen	82.757.100	PAD
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	39.099.300	PAD
1	03	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	3 laporan	514.268.300	PAD
	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6.670.761.321</b>	<b>PAD/DAU</b>
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	75	4.659.206.721	DAU
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	12 dokumen	1.880.440.000,00	DAU



1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	12 laporan	62.188.400	PAD
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Metro	16 laporan	68.926.200	PAD
1	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</b>	Kota Metro	<b>12 Bulan</b>	<b>100.000.000</b>	
1	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Metro	1 Dokumen	50.000.000	PAD
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Kota Metro	75 Dokumen	50.000.000	PAD

						Pegawai				
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kota Metro	100%	1.028.979.730	PAD
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	10 paket	47.023.000	PAD
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	14 paket	488.481.000	PAD
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Metro	120 paket	294.917.550	PAD
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Metro	60 paket	38.810.000,00	PAD
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Metro	50 dokumen	48.061.180	PAD
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	10 kali	67.077.000	PAD

1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Kota Metro	1 dokumen	44.610.000	PAD
1	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>28 Unit</b>	<b>181.880.000</b>	<b>PAD</b>
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kota Metro	28 Unit	181.880.000	PAD
1	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>1.524.943.660</b>	<b>PAD</b>
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	150 laporan	10.000.000	PAD
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Metro	12 laporan	1.452.640.660	PAD
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	41 laporan	62.303.000	PAD
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>1.157.735.300</b>	<b>PAD</b>

					Daerah	daerah yang terpelihara dengan baik				
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	1 Unit	39.670.000	PAD
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	22 Unit	350.766.800	PAD
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Metro	4 unit	50.000.000	PAD
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro	40 unit	33.123.400	PAD
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Kota Metro	3 Unit	684.175.100	PAD

1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Rasio luas Tidak terjadi genangan &gt; 2 kali setahun</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>20%</b>	<b>9.797.960.000</b>	<b>PAD/DBH</b>
1	03	02	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>13,01 Km</b>	<b>5.898.991.500</b>	<b>PAD/DBH</b>
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kota Metro	6 Unit	250.000.000	DBH
1	03	02	2.01	75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kota Metro	50 Lembaga	332.681.700	PAD
1	03	02	2.01	80	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Metro	3 Km	657.298.900	DBH
1	03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi/Direstorasi	Kota Metro	3,6 Km	1.150.000.000	DBH
1	03	02	2.01	115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Kota Metro	6,41 Km	3.259.010.900	DBH

1	03	02	2.01	121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kota Metro	10 Unit	250.000.000	DBH
1	03	02	2.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Terselenggara nya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>183,53 Km</b>	<b>3.898.968.500</b>	<b>DBH</b>
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kota Metro	25,03 Km	1.635.179.200	DBH
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Metro	153,5 Km	1.869.539.300	DBH
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	5 Km	394.250.000	DBH
1	3	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Jumlah Sambungan Rumah Aktif Tahunan</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>2851 SR</b>	<b>1.279.939.475</b>	<b>DBH</b>

1	3	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/Kota</b>	<b>Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>2851 SR</b>	<b>1.279.939.475</b>	<b>DBH</b>
1	3	03	2.01	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	1 Unit	647.686.000	DBH
1	3	03	2.01	32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Metro	196 SR	632.253.475	DBH
1	03	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>28%</b>	<b>1.386.000.000</b>	<b>DBH/PAD</b>
1	3	04	2.01		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>28%</b>	<b>1.386.000.000</b>	<b>DBH/PAD</b>

1	3	04	2.01	17	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Kota Metro	7 unit	1.386.000.000	DBH
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Kota Metro	450 Rumah Tangga	388.000.000	DBH
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Kota Metro	450 Rumah Tangga	388.000.000	DBH
1	03	5	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD Limbah Domestik)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	1 Unit	138.000.000	DBH
1	03	5	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Sesuai Standar	Kota Metro	20 Rumah Tangga	250.000.000	DBH
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kota Metro	78%	4.671.651.525	DBH
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kota Metro	17500 Meter	4.671.651.524,50	DBH



1	03	06	2.01	024	Peningkatan Saluran drainase perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Metro	15800 Sistem Drainase Perkotaan	4.223.451.524,50	DBH
1	03	06	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Metro	1000 Sistem Drainase Perkotaan	448.200.000	DBH
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>14%</b>	<b>10.750.674.250</b>	<b>PAD, DBH</b>
1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>14%</b>	<b>10.750.674.250</b>	<b>PAD, DBH</b>
1	03	08	2.01	17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuain	Kota Metro	16 Bangunan Gedung	2.508.177.250	DBH
1	03	08	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa	Kota Metro	12 Bangunan Gedung	800.000.000	DBH

						Berkala				
1	03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	10 Dokumen	7.007.497.000,-	DBH
1	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Metro	55 Dokumen	435.000.000	DBH
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Ruang publik yang berubah peruntukkannya</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>0%</b>	<b>459.348.000</b>	<b>DBH</b>
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Dan	Kota Metro	2 kawasan	459.348.000	DBH

					Kabupaten/Kota	Lingkungan Di Daerah Kabupaten/Kota yang terpeihara dengan baik				
1	03	09	2.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kota Metro	1 Kawasan	459.348.000	DBH
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	<b>Kota Metro</b>	92,27	<b>47.513.866.600</b>	PAD, DBH
1	03	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	<b>Kota Metro</b>	92,27	<b>47.513.866.600</b>	PAD, DBH
1	03	10	2.01	28	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Diseluruh Wilayah Kota Metro	1 Dokumen	135.772.300	PAD
1	03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Diseluruh Wilayah Kota Metro	2,15 Km	7.212.136.300	PAD
1	03	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Diseluruh Wilayah Kota Metro	35,39 Km	24.796.096.800	DBH

1	03	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Diseluruh Wilayah Kota Metro	3,44 Km	5.371.589.500	DBH
1	03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Diseluruh Wilayah Kota Metro	19 Jembatan	59.990.000	DBH
1	03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Diseluruh Wilayah Kota Metro	6 Km	486.228.500	DBH
1	03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Diseluruh Wilayah Kota Metro	10,91 KM	8.403.149.400	DBH
1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Dinas PUTR Kota Metro	1 M	1.048.903.800	DBH
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b>	<b>Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>60%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>PAD</b>
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>60%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>PAD</b>
1	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kota Metro	90 orang	150.000.000	PAD

1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi	Kota Metro	25 dokumen	100.000.000	PAD
1	03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kota Metro	25 Dokumen	100.000.000	PAD
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Ketaatan terhadap RTRW</b>	Kota Metro	<b>91%</b>	<b>1.507.100.000</b>	PAD
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kota Metro	5 dokumen	170.000.000	PAD
1	03	12	2.01	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kota Metro	5 orang	170.000.000	PAD
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Kota Metro	6 dokumen	200.000.000,00	PAD

1	03	12	2.02	03	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Metro	5 Dokumen	200.000.000,00	PAD
1	03	12	2.03		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Kota Metro	10 Dokumen	350.000.000,00	PAD
1	03	12	2.03	05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Metro	5 Dokumen	200.000.000,00	PAD
1	03	12	2.03	06	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Metro	5 Dokumen	150.000.000,00	PAD
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Kota Metro	7 Dokumen	787.100.000	PAD
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kota Metro	1 Kasus	20.000.000,00	PAD

1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Metro	7 Dokumen	767.100.000,00	PAD
---	----	----	------	----	---------------------------------------	--	------------	-----------	----------------	-----

# BAB V

## PENUTUP

---

### PENUTUP

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rancangan awal rencana kerja Tahun 2024 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Metro . Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor..